

## REFORMASI PRINSIP-PRINSIP PERUMUSAN KEBIJAKSANAAN EKONOMI

Oleh : Baban Sobandi, SE., M. Si.

*Ilmu ekonomi konvensional tidak mampu menyelesaikan krisis ekonomi secara tuntas. Puncak krisis ekonomi di Indonesia, dengan indikator turunnya laju pertumbuhan hingga hampir 15%, anjloknya nilai rupiah hingga hampir Rp20.000,00 per \$ USA, inflasi yang mencapai 84%, dan meningkatnya jumlah penduduk miskin dari 22,5 juta menjadi 49,5 juta jiwa, yang kesemuanya berlangsung dari tahun 1997 ke 1998, merupakan dampak akumulatif dari kondisi politik, hukum, budaya, ekonomi, dan dimensi lainnya yang tidak kondusif. Kajian deskriptif ini membuktikan secara kualitatif kondisi perekonomian Indonesia sejak krisis pertengahan 1997 yang lalu, paling tidak dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, inflasi, perdagangan luar negeri, arus modal, dan indikator lainnya. Pada bagian akhir, disampaikan koreksi fundamental terhadap prinsip-prinsip ekonomi konvensional.*

### Pendahuluan

Sangat sulit mengukur dengan pasti dampak kebijakan politik terhadap perekonomian, meskipun diakui bahwa kebijakan dan "perilaku" politik secara umum mempunyai pengaruhnya yang signifikan terhadap perekonomian. Teori ekonomi konvensional yang berlaku saat ini, juga mempunyai keterbatasan dalam menjelaskan hubungan kausalitas ini, dalam arti pengukuran secara pasti. Itulah nampaknya yang melatarbelakangi Paul Ormerod menulis buku yang berjudul *The Death of Economics* (Matinya Ilmu Ekonomi), dalam arti terlalu banyak simplifikasi atau penyederhanaan dalam bentuk model dari teori ekonomi, yang pada era sekarang ini, nampaknya banyak dilangar. Asumsi *ceteris paribus* yang selalu mewarnai kaidah-kaidah ekonomi, sulit untuk diterapkan saat ini. Krisis yang terjadi dan melanda berbagai negara belakangan ini, dan tidak manjuranya ramuan-ramuan ekonomi dalam mengobati krisis

tersebut, menunjukkan sulitnya permasalahan ekonomi dilepaskan dari aspek lainnya. Politik, sosial, budaya, kepercayaan, dan lain-lain.

Ilustrasi mengenai lemahnya kemampuan prediksi dari ilmu ekonomi ini, dapat digambarkan antara lain, tatkala BJ. Habibie dicalonkan sebagai presiden pada Sidang MPR 1999 yang lalu, rupiah di pasar uang anjlok, indeks harga saham pun di bursa efek mengalami tekanan. Pertanyaannya, berapa besarkah pengaruh pencalonan Habibie terhadap anjloknya rupiah? Bagaimana mengukurnya? Apakah ada faktor lain yang mempengaruhinya?

Atau saat DPR melakukan voting untuk memilih peresiden, antara KH Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri, diberitakan bahwa tatkala Suara Mega mengungguli Gus Dur nilai rupiah dan harga saham menguat tajam. Namun, tatkala Gusdur yang terpilih rupiah dan saham pun justru

melemah kembali. Pertanyaannya, Berapa besar pengaruh keunggulan suara Mega atau Gus Dur terhadap kenaikan nilai tukar rupiah? Bagaimana mengukurnya secara pasti? Adakah faktor lain yang ikut memberikan kontribusi terhadap kenaikan/penurunan rupiah dan saham?

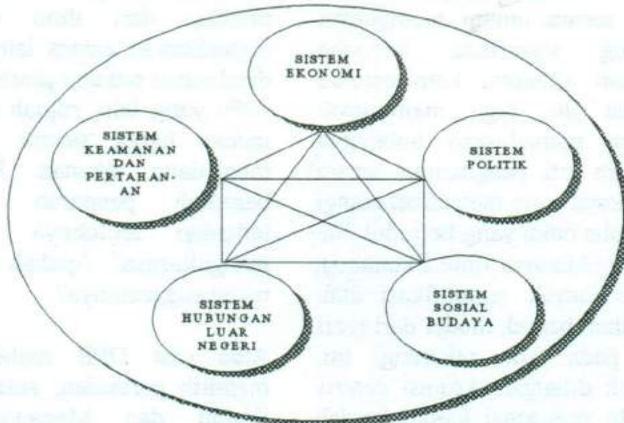
Demikian juga, para pengamat mengatakan bahwa beberapa kebijakan Pemerintah saat ini (Baca: Gusdur) banyak membuat orang jadi bingung, yang dampaknya menimbulkan sentimen negatif terhadap pasar. Yang paling nyata kelihatan adalah terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah dibandingkan mata uang asing. Namun, pengukuran secara pasti level *statement* yang bagaimana yang menyebabkan fluktuasi rupiah dan saham itu?

Lain halnya dengan variabel-variabel ekonomi. Variabel-variabel ini mudah diukur sehingga secara pasti bisa dikatakan tingkat pengaruh

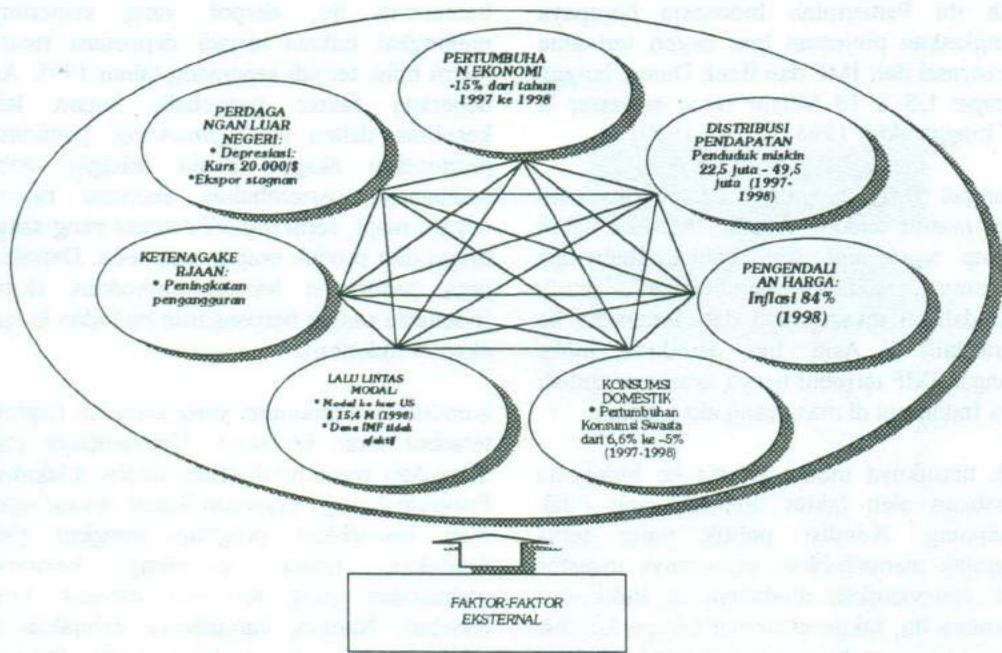
atasdampaknya. Misalnya, jika dilakukan penurunan bea masuk impor mobil, maka terjadi peningkatan dalam kuantitas impor mobil. Dalam kaitan ini, kita bisa melakukan pengukuran berapa unit peningkatan kuantitas impor setiap penurunan satu rupiah bea masuk impor. Demikian juga, apabila pemerintah melalui BULOG, menerapkan kebijakan harga terendah dari komoditas pertanian, maka dapat dihitung dengan pasti tingkat harga berapa agar di satu pihak mampu menyerap *supply* komoditas tersebut dari petani, di lain pihak petani tidak dirugikan akibat harga terlalu rendah.

Meskipun demikian, kebijakan dan “perilaku” politik mempengaruhi secara signifikan terhadap perekonomian, bahkan bersifat timbal balik. Perekonomian tidak bersifat inferior terhadap kebijakan politik. Demikian pula situasi politik tidak inferior terhadap kebijakan ekonomi.

Gambar 1 : Keterkaitan Antar Sistem



Gambar 2 : Keterkaitan Antar Sub Sistem Dalam Sistem Ekonomi



**Ilustrasi : Sensitivitas Perekonomian di Era Habibie**

Krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan 1997 telah memicu pergolakan politik dalam negeri, sehingga pada gilirannya atas desakan mahasiswa mampu melengserkan Presiden Suharto ke Prabon. Tidak berakhir sampai di situ, tampilnya BJ. Habibie sebagai pengganti Soeharto memperpanjang rantai krisis politik, karena Habibie dianggap sama sebagai bagian dari rezim orde baru, yang tidak luput dari KKN. Padahal KKN merupakan sasaran utama reformasi yang dimotori mahasiswa itu. Hingga di sini, krisis ekonomi bukannya pulih, malah justru makin parah.

Dampak yang lebih terasa bagi semua masyarakat negeri ini, dan terutama golongan ekonomi paling bawah adalah krisis ekonomi

yang ditandai oleh penurunan pertumbuhan ekonomi hingga -15% dari 1997 ke 1998, penurunan kesempatan kerja (pertambahan jumlah pengangguran) akibat PHK besar-besaran di sektor swasta, inflasi mencapai 84% (1998), peningkatan jumlah penduduk miskin dari 22,5 Juta orang pada Tahun 1997 menjadi 49,5 juta orang pada tahun 1998, serta depresiasi rupiah yang sangat drastis hingga hampir mencapai level Rp. 20.000,00 per dollar USA.

Akibat selanjutnya, kondisi perekonomian pun terus melorot. Secara umum, semua indikator ekonomi makro mengalami penurunan kinerja. Aliran modal ke luar negeri terus berlanjut sebagai dampak kondisi sosial politik yang terus bergejolak. Hingga, sepanjang Tahun 1998 telah terjadi aliran modal ke luar swasta sebesar US \$ 15,4 Milyar (Econit, 1999).

Untuk itu Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan pinjaman luar negeri terutama yang berasal dari IMF dan Bank Dunia, hingga mencapai US \$ 13 Milyar sejak semester II 1997 hingga akhir 1998 (Econit, 1999).

Dukungan IMF ternyata tidak diikuti oleh aliran masuk modal swasta. Mereka lebih bersikap *wait and see*, bahkan beberapa diantaranya sudah memutuskan untuk memindahkan investasinya dari Indonesia ke negara lain di Asia. Jika demikian, maka dukungan IMF tersebut hanya akan menambah beban Indonesia di masa yang akan datang.

Tidak masuknya modal swasta ke Indonesia disebabkan oleh faktor internal yang tidak mendukung. Kondisi politik yang terus bergeser menyebabkan waswasnya investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sementara itu, faktor eksternal berupa kondisi internasional juga turut memberikan kontribusi terhadap seretnya modal swasta masuk ke Indonesia. Krisis ekonomi yang melanda Jepang misalnya, telah menurunkan investasinya -84% dari US \$ 5,5 Milyar pada Tahun 1997 menjadi US \$ 894 Juta pada Tahun 1998. Investasi asing langsung ke *developing countries* juga secara total mengalami penurunan dari US \$ 127 Milyar pada Tahun 1997 menjadi US \$ 106 Milyar tahun 1998 (Econit, 1999).

Konsumsi domestik pun mengalami penurunan. Pertumbuhan konsumsi swasta (*private consumption*) anjlok dari 6,6% pada Tahun 1997 menjadi -5% pada Tahun 1998. Hal ini disebabkan oleh merosotnya daya beli, inflasi yang tinggi, dan tingkat bunga yang masih relatif tinggi.

Sementara itu, ekspor yang semestinya meningkat taklaka terjadi depresiasi rupiah, justru tidak terjadi sepanjang tahun 1998. Ada beberapa faktor penyebab, antara lain: kesulitan dalam *trade financing*, penurunan permintaan ekspor dunia sebagai akibat stagnannya pertumbuhan ekonomi negara-negara maju, serta *import content* yang sangat tinggi dari produk ekspor Indonesia. Demikian juga penurunan harga komoditas ekspor Indonesia sangat berpengaruh terhadap kinerja ekspor Indonesia.

Kondisi perekonomian yang semakin terpuruk tersebut terus berlanjut. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah telah dicoba dilakukan. Program Jaring Pengaman Sosial (*social safety Net*) merupakan program kongkrit yang ditujukan untuk menolong kelompok masyarakat yang terkenan dampak krisis tersebut. Namun, nampaknya kebijakan ini tidak banyak menunjukkan hasil. Program demi program, bantuan demi bantuan, ternyata belum mampu untuk membangkitkan kembali perekonomian Indonesia ke kondisi normal. Singkatnya waktu persiapan, kurangnya sosialisasi, kurang akuratnya data mengenai kelompok sasaran, kurang siapnya kelembagaan pelaksana yang ada, serta pemahaman yang belum mendalam mengenai konsep dasar JPS itu sendiri, merupakan faktor faktor kelemahan yang menghambat keberhasilan program ini.

Beberapa analis mengatakan, ternyata krisis yang terjadi bukan sekedar krisis ekonomi tetapi lebih jauh dari itu adalah krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan berpangkal dari krisis moral. Habibie yang menggantikan Soeharto ternyata tidak cukup dipercaya oleh masyarakat. Atas dasar itu, maka masyarakat mendesak melalui legislatif untuk mengadakan

Pemilu yang benar-benar jujur, dengan harapan dapat dipilih seorang presiden yang dipercaya rakyat, sehingga muncul kepercayaan rakyat yang pada akhirnya mampu menyelesaikan semua persoalan bangsa dengan cepat.

Alasan ini nampaknya cukup logis, dengan melihat pengalaman negara-negara tetangga yang sama-sama dilanda krisis. Sebagai contoh, Korea mengalami pergantian pemimpin pada Bulan Desember 1997 dari *Kim Young Sam* ke *Kim Dae Jung* yang dipercaya baik di dalam negeri maupun di luar

negeri, sehingga pada awal 1998 ekonomi Korea mulai membaik. Thailand, yang mengalami 3 kali pergantian Perdana Menteri sejak Juli 1997, juga mulai membaik setelah *Chuan Leek Pai* yang dipercaya terpilih sebagai Perdana Menteri. Dan untuk itu Sidang DPR Tahun 1999 lalu, berhasil memilih KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden, yang diharapkan mampu mengatasi krisis dengan tuntas. Kedua tokoh ini dianggap paling dapat diterima oleh masyarakat. Bagaimana kinerja dua tokoh ini hingga sekarang ? Mari kita lihat !

Tabel 1 : Beberapa Indikator Ekonomi Makro Indonesia

	1997	1998	1999
Nominal GDP (US\$ Billion)	216,0	97,6	142,3
Nominal GDP per capita (US\$)	1.079	474	692
Growth of Real GDP	4,60%	-15%	-4%
Inflation (CPI)	7%	84%	25%
Growth of M1	22%	45%*	12%
Growth of M2	23%	67%*	14%
Growth of Domestic Credit	43%	23%*	7%
Export (US\$ Billion)	53,55	49,8	48,804
Import (US\$ Billion)	41,68	26,68	29,34
Trade Balance (US\$ Billion)	11,87	24,73	21,03
Current Account (US\$ Billion)	-5	3,1	2,8
Rupiah Deposit Rate (3-month)	20,33%	43,8%**	30%
Exchange Rate (end of year)	4650	7979	8000
Foreign Debt (US\$ Billion)	137,4	142,6***	
Foreign Reserve (US\$ Billion)	17,43	14,28	
*November 1998			
** Des I 1998			
***Posisi pinjaman termasuk penarikan pinjaman IMF			

Sumber: ECONIT, 1999

### **Ilustrasi : Sensitifitas Perekonomian di Era Gus Dur - Mega**

Delapan Bulan Pemerintahan Gusdur – Mega telah berjalan. Perubahan mendasar dalam perekonomian belum nampak jelas. Instabilitas nilai tukar masih tetap terjadi. Bahkan beberapa pengamat menilai, kinerja pemerintahan sekarang masih terlalu banyak angka merahnya. Bahkan isu KKN dalam tubuh pemerintahan yang sekarang ini, masih tetap menjadi bahan gunjingan elit politik tingkat atas.

Sebenarnya, kalau kinerja pemerintahan masih banyak angka merahnya, berarti juga kinerja lembaga legislatif masih kurang baik, karena sejumlah hak yang dimiliki oleh legislatif yang dimaksudkan untuk supaya pemerintah berkinerja baik, belum dapat dilaksanakan.

Saya tidak akan banyak membahas mengenai hal ini. Namun, saya mengajak kepada pembaca marilah kita mengidentifikasi beberapa kebijaksanaan yang digulirkan Pemerintah bahkan bukan hanya kebijakan dalam artian sempit, tetapi juga statement Pemerintah (Baca: Gus Dur) yang memiliki dampak terhadap Perekonomian Nasional. Untuk melihat dampak ini, tidak perlu melakukan analisis yang sangat kritis, cukup memperhatikan fenomena beberapa indikator ekonomi selama beberapa waktu, dengan mengkaitkannya terhadap kebijakan-kebijakan dan “perilaku” dan statement politik. Beberapa diantaranya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- Pengangkatan Kabinet Persatuan Nasional dengan banyaknya muka lama yang notabene non-Reformis, kurang mendukung terhadap gairah investasi. Investor masih merasa ragu terhadap

komitmen Gus-Dur dalam menegakkan Supremasi Hukum, khususnya dalam pemberantasan KKN.

- Pengurangan peran TNI atau dengan kata lain Supremasi Sipil dalam pemerintahan (termasuk pengangkatan Juwono Soedarsono sebagai Menhan), memberikan sentimen positif terhadap pasar karena hal ini merupakan salah satu sasaran reformasi.
- Otonomi Daerah dan demokratisasi memberikan angin segar bagi tumbuhnya kreativitas daerah. Pada gilirannya, perekonomian bergerak positif (Meskipun substansi UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 serta implementasinya masih belum terealisasi dengan baik)
- Kenaikan Gaji Pegawai Negeri, semula memberikan respon positif terhadap aktivitas perekonomian. Namun, tatkala diketahui bahwa kenaikan gaji pegawai tidak proporsional, maka aksi demo dan komentar negatif pun bermunculan. Secara tidak langsung telah memberikan pengaruh negatif terhadap perekonomian secara makro, meskipun dalam level yang tidak terlalu tinggi.
- Pemecatan Hamzah Haz, Wiranto, dan Dua Menteri lainnya (Jusuf Kala dan Laksamana Sukardi), telah menimbulkan prediksi dunia usaha akan terjadinya guncangan politik yang signifikan. Akibatnya, tindakan politik ini memberikan sentimen negatif terhadap perekonomian, yang antara lain tercermin di pasar uang dan pasar modal.
- Pengusutan Harta Mantan Presiden Suharto yang tidak kunjung selesai, serta usulan penyelesaian Soeharto secara politis, bukan secara hukum, merupakan keputusan

politik yang menimbulkan pesimisme pasar dalam memacu kinerja perekonomian.

- Pengangkatan orang-orang politis dalam jabatan karier, seperti Ka BULOG Rizal Ramli, dan Sekjen Dephutbun Suripto, sedikitnya telah menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi bisa dilihat sebagai sinyal positif karena orang melihat pengangkatan itu didasari profesionalisme. Namun sudut pandang lain justru menimbulkan sentimen negatif, jika hal itu dilihat sebagai fenomena KKN.
- Pembentukan Badan-badan Non Struktural (DEN, DPUN, DPEN, dll) bisa dilihat sebagai sesuatu yang positif dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi, namun di lain pihak bisa dilihat sebagai cermin ketidak mampuan tim ekonomi kabinet dalam mengatasi permasalahan ekonomi.
- Usulan pencabutan Tap. 25 Tahun 1966 telah menimbulkan kecurigaan umat beragama dan menolak usulan tersebut. Gejala protes pun bermunculan yang lebih lanjut memberikan sinyal negatif terhadap kondisi perekonomian.
- Terlunta-luntanya penyelesaian masalah Maluku telah mengundang beberapa kali gelombang protes massa, yang pada akhirnya berpengaruh negatif terhadap perekonomian nasional.
- Kasus Bulog dan kasus Sumbangan Sultan Brunei dilihat oleh beberapa pengamat sebagai KKN yang dampaknya sangat merugikan rakyat secara langsung. Hal ini menimbulkan kecurigaan pasar terhadap kesungguhan dan kemampuan Gus Dur dalam memimpin negara ini.
- Penangkapan tokoh yang berseberangan politik, juga memberikan sinyal negatif terhadap perekonomian nasional.

- Penggunaan hak interpelasi DPR terhadap presiden untuk menanyakan alasan pemecatan Jusuf Kalla dan Laksamana Sukardi diprediksi oleh pasar akan menimbulkan guncangan politik, sehingga pasar memberikan sinyal negatif terhadap perekonomian.
- Isu Sidang Tahunan MPR (2000) akan menjadi Sidang Istimewa, karena penilaian terhadap kinerja Gusdur yang kurang baik, telah menyebabkan rupiah turun. Dan setelah ternyata hal itu tidak terjadi, rupiah pun menguat kembali.
- Dan banyak lagi kebijakan, perilaku, dan pernyataan-pernyataan politik pemerintah yang berpengaruh positif atau negatif terhadap perekonomian nasional.

### **Koreksi Terhadap Prinsip-prinsip Ekonomi Konvensional**

Fenomena sensitivitas perekonomian terhadap gejala perubahan situasi politik dan sosial seperti digambarkan di atas, disebabkan oleh rapuhnya tatanan perekonomian yang ada. Dan rapuhnya tatanan perekonomian ini, karena dibangun diatas pondasi dengan prinsip-prinsip yang terlalu berorientasi kepada individualistik, sehingga semua orang berfikir tentang dirinya tanpa memperhatikan orang lain. Tatkala, situasi politik berubah, yang pertama kali muncul dalam pikiran setiap orang adalah bagaimana menyelamatkan kekayaannya bahkan bagaimana mengambil keuntungan dari perubahan situasi politik ini. Akhirnya, perekonomian pun gonjang-ganjing tak menentu.

Untuk itu, koreksi pertama terhadap prinsip ekonomi konvensional adalah, mengubah *mind-set* dari semua pelaku ekonomi (baca:

masyarakat produsen dan konsumen) dari individualistik ke “sosialistik” (bukan sosialisme) dan berketuhanan. Bahwasannya, pola pikir dan perilaku mempunyai hubungan timbal balik dengan sistem yang berlaku. Manusia bisa menciptakan sistem dan diikutinya, sebaliknya sistem yang dibuat oleh manusia pun dapat mengubah pola pikir manusia. Tatkala sistem bunga ditetapkan dalam dunia perbankan, perilaku orang menyimpan uang di bank didorong oleh motivasi ingin mendapatkan bunga itu. Makin tinggi tingkat bunga makin senang orang menabung, dan sebaliknya jika bunga rendah. Sebenarnya, apabila yang diperkenalkan dan dimasukkan dalam pola pikir manusia sejak awal adalah sistem bagi hasil dalam perbankan misalnya, maka yang akan mempengaruhi perilaku menabung masyarakat adalah prospektif perekonomian riil dan *akuntabilitas* dari lembaga keuangan tersebut. Dengan demikian, langkah yang harus dilakukan dalam mengubah pola pikir tersebut, melakukan secara kontinyu dan terprogram prinsip-prinsip “sosialistik” dan “ketuhanan”.

Perlu disadari bahwa kekayaan alam yang ada pada hakekatnya adalah anugrah dari Tuhan untuk keperluan ummat manusia. Hal ini diakui oleh semua ummat manusia dalam agama apa pun. Dengan demikian pemanfaatannya tidak boleh menyimpang dan bertentangan dengan aturan yang diberikan oleh Tuhan. Salah satu aturan Tuhan yang bersifat universal dalam agama dan kepercayaan apa pun adalah bahwasannya dalam semua tindakan tidak boleh merugikan orang lain, bahkan justru harus menolongnya tatkala orang lain mendapat kesusahan. Implikasi dari kaidah ini melahirkan beberapa prinsip fundamental dalam perekonomian “sosialistik dan berketuhanan”, yaitu:

1. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh setiap individu, bukan hanya untuk memenuhi kepentingan individu belaka, melainkan juga untuk memenuhi kepentingan orang lain, dalam rangka mengabdikan kepada Tuhan.

Prinsip ini sama sekali bertentangan dengan prinsip mekanisme pasar murni yang menyatakan bahwa “apabila semua individu berusaha memenuhi kepentingannya masing-masing, maka kepentingan masyarakat secara umum akan terpenuhi”. Dalam beberapa hal prinsip ini dapat dibenarkan. Misalnya, ketika masyarakat memerlukan beras sebagai makanan pokoknya, tidak perlu menyuruh petani untuk menanam padi. Secara alamiah, dengan didorong keinginan untuk memenuhi keperluan individunya untuk mendapatkan uang, petani akan melihat pasar dan selanjutnya menanam padi. Demikian juga, seseorang yang menginginkan sarapan bubur ayam setiap paginya, tidak perlu menyuruh menyuruh seseorang untuk berjualan bubur di depan rumahnya, karena secara naluriah, orang yang melihat adanya potensi permintaan bubur di tempat itu, dengan sendirinya akan membawa roda buhurnya ke sana. Namun dalam hal lain prinsip ini justru menimbulkan keserakahan, ketamakan, dan sikap egoisme yang berlebihan, sehingga kesenjangan antar anggota masyarakat pun semakin tinggi.

Dalam prinsip ekonomi alternatif ini, justru dibalik. “Jika semua orang berupaya tidak merugikan orang lain, maka semua orang akan diuntungkan”. Atau “Jika semua orang berupaya memperhatikan kebutuhan orang lain, maka kebutuhan pribadinya

akan terpenuhi". Lebih tegas lagi, "Jika semua orang berupaya memenuhi kebutuhan orang lain, maka kebutuhannya akan terpenuhi". Prinsip ini juga sekaligus akan menghilangkan sikap penghalalan segala cara, penipuan, kecurangan, ketamakan, kerakusan, dan sikap lain yang mengarah kepada eksploitasi secara tidak terkendali. Bagaimana tidak? Setiap pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh setiap orang selalu dibatasi oleh rambu-rambu kepentingan orang lain. Bahkan, dalam batas-batas tertentu, usaha individu pun harus memberikan kontribusi terhadap orang lain.

2. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki individu tidak boleh mengganggu kepentingan orang lain, lebih-lebih kepentingan masyarakat secara umum. Dengan demikian, menjadi prinsip yang kedua, bahwa pemilikan sumber daya oleh individu, dibatasi oleh kepentingan masyarakat secara umum. Kepentingan masyarakat adalah prioritas.

Prinsip ini nyata berentangan dengan prinsip kapitalisme yang "menuhankan" kepentingan individu, dan itu sebagai implikasi dari sistem pasar yang dianut. Namun demikian, prinsip ini juga tidak berarti sama dengan prinsip sosialis yang "sama rata sama rasa". Dalam prinsip sosialis kebebasan individu sama sekali tidak diakui. Dalam hal ini pemerintahlah yang dominan. Semua diatur oleh pemerintah, sehingga dikenal dengan sistem komando, yang bersifat sentralistis. Dalam prinsip ekonomi alternatif ini, keberadaan individu diakui, namun tatkala "berseberangan" dengan kepentingan masyarakat

secara umum, maka kepentingan masyarakatlah yang harus diutamakan.

3. Kecurangan dalam meraih kekayaan merupakan perbuatan yang merugikan orang lain. Oleh karena itu, prinsip yang ketiga adalah tidak boleh meraih kekayaan dengan cara-cara curang, baik nampak atau pun tidak.

Prinsip ini jelas tidak sejalan dengan prinsip kapitalis, yang meskipun tidak memperbolehkan cara-cara curang, namun pendefinisian "curang" itu sendiri ada perbedaan. Spekulasi misalnya, dalam ekonomi kapitalis tidak dilarang. Dalam ekonomi alternatif ini, spekulasi dinilai sebagai tindakan yang bukan hanya dapat merugikan orang lain, tetapi bisa jadi malah merugikan diri sendiri. Demikian juga, penimbunan barang, atau pembelian barang secara besar-besaran sehingga dapat mempengaruhi stok barang di pasaran yang akhirnya berdampak kepada gejolak harga, yang dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat luas, dalam ekonomi kapitalis merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Dalam ekonomi alternatif perilaku semacam ini tidak dibenarkan, karena mengganggu bahkan dapat menyengsarakan masyarakat.

4. Yang menjadi spirit dalam ekonomi alternatif adalah "kerjasama", bukannya "persaingan" yang hanya akan melahirkan individualistis dan pengurusan terhadap sumber daya. Dalam hal-hal tertentu "persaingan" dalam arti "berlomba dalam kebaikan" sangat dianjurkan, namun bukan berlomba dan bersaing dengan cara yang merugikan pihak lain.

Diakui atau tidak, dalam perekonomian global sekarang ini pun "spirit kerjasama" ini mulai nampak. Suatu produk elektronik misalnya, hampir sulit diidentifikasi sebagai produk suatu negara, karena berbagai komponennya dibuat oleh berbagai negara. Ini menunjukkan adanya kerja sama. Kenyataan ini, membuktikan bahwa "spirit kerja sama" secara alamiah sesuai dengan fitrah manusia dan akan nampak dengan sendirinya. Realita ini juga menunjukkan perlunya koreksi terhadap paradigma lama yang hanya selalu bertumpu pada *comparative advantage*-nya ekonomi klasik, atau *competitive advantage*-nya ekonomi kontemporer. Bukan berarti *comparative advantage* dan *competitive advantage* tidak berlaku lagi, itu sesuatu yang alamiah. Namun, muatan kerjasama sebenarnya adalah yang paling penting dalam perekonomian. Bahkan tidak mustahil, suatu negara yang tidak memiliki kedua keunggulan tersebut dibandingkan negara lainnya, harus mampu memproduksi barang yang diperlukan oleh pasar internasional.

5. Kekayaan pribadi berperan sebagai *capital productive* yang akan meningkatkan produksi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Bukan sebaliknya, meningkatkan dulu produksi nasional, kemudian dibagikan kepada individu. Implikasinya, tidak diperbolehkan penumpukan kekayaan pada beberapa gelintir orang saja.

Berkaitan dengan prinsip ini, paradigma *trickle-down effect* (efek perembesan) mendapat koreksi. Dalam paradigma *trickle-down effect*, dinyatakan bahwa apabila konsentrasi perekonomian pada kelompok usaha besar untuk memacu

pertumbuhan ekonomi, maka pada gilirannya kelompok usaha kecil dan masyarakat kecil akan mendapatkan rembesannya, sehingga secara akumulatif perekonomian akan tumbuh dengan pesat dan pemerataan pun akan tercipta.

Kegagalan paradigma ini nampak jelas di Indonesia. Sejak beberapa tahun silam kebijakan ekonomoi di Indonesia banyak memihak golongan ekonomi skala besar, dengan harapan pertumbuhan dan rembesan akan terjadi. Namun, kenyataan menunjukkan lain. Dengan sifat serakah dan tamak dari manusia, justru kesenjanganlah yang semakin menganga. Sehingga pada gilirannya kecemburuan sosial terjadi, dan pada akhirnya gejolak sosial pun tidak dapat dihindari. Kalau kita telaah dari sudut pandang sosial ekonomi, berbagai aksi demonstrasi dari kelompok buruh dan masyarakat kecil lainnya, menunjukkan kegagalan dari *trickle-down effect*.

6. Perlu pengakuan terhadap kepemilikan bersama atas beberapa sumber daya, seperti air, barang tambang, bahan bakar, bahkan jenis bahan makanan tertentu. Prinsip ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penguasaan terhadap berbagai kecaaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dalam hal ini peran negara sangat penting, bahkan sebagai monopolist sekali pun. Teori yang menyatakan monopoli akan menyebabkan inefisiensi, atau efisiensi hanya akan tercipta dalam kondisi persaingan, sebenarnya tidak selalu benar. Dalam hal monopoli pemerintah yang dilandasi semangat kerjasama dan selalu ingin memberikan layanan terbaik bagi masyarakatnya, maka monopoli pun dapat

menciptakan efisiensi bahkan inovasi. Terlebih lagi apabila monopoli dilakukan dalam produksi barang atau jasa yang tidak mungkin diproduksi dalam skala kecil.

7. Perlu dicegah terjadinya keuntungan berlebih, ketidak jujur, ketidakadilan, diskriminasi dan penindasan, karena ini semua merupakan penyakit yang merongrong kesejahteraan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, pemberdayaan hukum merupakan instrumen yang harus diterapkan sejalan dengan implementasi prinsip-prinsip ekonomi alternatif.

### Penutup

Ada tiga hal yang pokok yang perlu digaris bawahi berkenaan dengan fenomena perekonomian saat ini. *Pertama*, bahwa sensitivitas perekonomian terhadap perilaku sosial, politik, keamanan, dan sistem lainnya menunjukkan adanya keterkaitan yang sangat erat antar berbagai sistem yang ada. Dalam kaitan ini, perumusan dan keberhasilan kebijakan dalam bidang ekonomi tidak terlepas dari kebijakan pada bidang lainnya. *Kedua*, krisis ekonomi yang melanda Indonesia khususnya dan dunia umumnya, berpangkal dari sistem ekonomi konvensional yang menganut prinsip-prinsipnya yang justru menimbulkan kerakusan, ketamakan, dan individualistik. Sehingga, gonjang-ganjing kondisi sosial, politik, dan kemanan yang memang mempunyai keterkaitan erat dengan perekonomian, direspon oleh masyarakat dengan upaya "bagaimana menyelamatkan diri

bahkan bagaimana mengambil keuntungan dari perubahan situasi ini, tanpa peduli dengan orang atau pihak lain". *Ketiga*, untuk mengobati kondisi perekonomian yang demikian, sata-satunya jalan adalah mengubah *mind-set* (pola pikir) semua pelaku ekonomi (masyarakat), dengan prinsip-prinsip ekonomi alternatif yang penuh semangat ketuhanan, kesetiakawana, kerjasama, dan menampilkan segala bentuk kecurangan dan ketidak-adilan.

### Daftar Pustaka

- Bank Indonesia, *Indikator Keuangan Propinsi Jawa Barat, Beberapa Edisi, Tahun 1999 dan Tahun 2000*
- Badan Pusat Statistik, *Indikator Ekonomi Makro Indonesia, Beberapa Edisi, Tahun 1999*
- Boumol, William J & Alan S. Blinder, *Economics: Principles and Policy*, Third Edition, Harcourt Brace Jovanovick Publishers, USA, 1986.
- ECONIT, *Tinjauan Ekonomi 1999*.
- Leftwich, Richard H & Ansel M. Sharp, *Economics of Social Issues*, Forth Edition, Business Publication Inc., Dallas, Texas, USA, 1980.
- McKenzie, Richard B, *Economic Issues In Public Policies*, McGraw-Hill, USA, 1980.
- Ormerod, Paul, *The Death of Economics*, 1997
- Weiss, John, *Economic Policy in Developing Countries; The Reform Agenda*, Prentice Hall, 1995.

